

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya pemeratakan perekonomian yang berbasis kerakyatan maka pemerintah berupaya meningkatkan terus sektor koperasi yang merupakan wadah kegiatan perekonomian rakyat. Karena koperasi mampu untuk mengembangkan seluruh potensi para anggota dan masyarakat umum, meningkatkan kualitas kehidupan manusia memperkuat perekonomian rakyat, meningkatkan perekonomian nasional. Untuk itu koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat dan sebagai sarana peningkatan kemajuan ekonomi rakyat, khususnya golongan ekonomi lemah harus semakin dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan serta mengembangkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan bagi terwujudnya masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran. (Sutantya, 2000 : 46).

Dalam empat tahun terakhir ini perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan kinerja yang sangat positif bagi masyarakat dengan angka pertumbuhan koperasi aktif rata-rata sebesar 2,5 persen pada periode 2012-2016. Berdasarkan data pemerintah hingga tahun 2017, koperasi yang masih aktif sebesar 27.445 dan yang tidak aktif 3.710 unit koperasi dan memiliki 16,8 juta anggota koperasi. Dengan rincian terdiri dari koperasi konsumen sebanyak 48.931 unit, koperasi produsen 13.871 unit, koperasi simpan pinjam 9.509 unit, koperasi jasa 1.661 unit, dan koperasi pemasaran 1.3310 unit. Dan dengan adanya volume usaha koperasi yang tercatat sebesar Rp 176,3

triliun, maka akan dapat memberi peluang untuk berkembangnya koperasi di wilayah Indonesia. (Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2018)

Pada awalnya koperasi didominasi oleh Koperasi Unit Desa (KUD). Peran terbesar KUD adalah keberhasilan mendukung peningkatan produksi pertanian terutama pangan. Memasuki tahun 2000 hingga saat ini koperasi Indonesia didominasi oleh koperasi simpan pinjam. Unit usaha simpan pinjam merupakan jenis usaha yang banyak dijalankan oleh koperasi, selain menguntungkan kegiatan ini dinilai sangat membantu anggotanya dalam hal keuangan serta menggalakkan semangat untuk menabung.

Berdasarkan tingkatannya, koperasi dibedakan menjadi dua jenis yakni koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer sendiri adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi serta didirikan oleh paling sedikit tiga koperasi primer. Berdasarkan survey tahun 2017 menunjukkan bahwa dari seluruh koperasi simpan pinjam yang merespon 93,95 persen merupakan koperasi primer, sedangkan sisanya 6,05 persen merupakan koperasi sekunder.

Seiring dengan perkembangan koperasi yang terus meningkat pengelolaan koperasi yang lebih profesional di masa depan sangat dibutuhkan terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Selain itu kurangnya kemampuan pelaku koperasi dalam bidang pengelolaan usaha juga termasuk kendala yang dihadapi koperasi yaitu rendahnya pendidikan dan kurangnya pengalaman pelaku tersebut dalam bidang akuntansi (Andreas, 2014). Pengelolaan keuangan yang baik masih sulit diterapkan pada badan usaha seperti koperasi. Untuk itu koperasi dituntut untuk mewujudkan dengan menerapkan prinsip

keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima, dan dipercaya baik oleh anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Salah satu bentuk transparansi yang harus dilakukan koperasi adalah dengan cara menyusun dan menerbitkan laporan keuangan organisasinya.

Laporan keuangan koperasi dapat menerbitkan informasi mengenai perkembangan atau kemunduran koperasi. Dalam laporan keuangan koperasi tercatat semua transaksi yang terjadi pada koperasi selama satu periode sehingga pemakai dapat mengetahui manfaat yang diperoleh sebagai anggota koperasi selama satu periode dengan SHU yang diperoleh, sumber daya yang dimiliki dan dapat diketahui pula kewajiban dan kekayaan bersihnya.

Dengan ini setiap penyusunan laporan keuangan mempunyai acuan atau pedoman yakni Standar Akuntansi Keuangan (SAK) salah satu standar tersebut adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP dijelaskan bahwa standar ini ditujukan untuk usaha mikro dan koperasi. Pada tahun 2009 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mulai menyusun dan mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Standart ini berlaku per 1 januari 2011 atas pernyataan pencabutan Standar Akuntansi Keuangan no.8 (PPSAK 8) atas pencabutan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.27 (PSAK 27) mengenai Akuntansi Koperasi dan digantikan dengan SAK yang mengacu pada IFRS. Standar Akuntansi keuangan yang mengacu pada IFRS dikelompokkan menjadi 2(dua) yaitu Standar Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di susun sebagai solusi bagi perusahaan menengah dan kecil yang sering menemukan kesulitan dalam menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang selama ini berlaku dan mensahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk entitas dalam menyajikan laporan keuangan. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

Di kota Mojokerto sudah banyak didirikan suatu badan usaha koperasi salah satunya adalah KSU Dwi Anugrah Mojokerto yang bergerak dalam bidang serba usaha dimana bentuk usaha ditawarkan kepada anggota dan masyarakat. KSU Dwi Anugrah Mojokerto juga menjalankan kegiatan usahanya berupa jasa simpan pinjam dan penjualan barang dagang kepada para anggota dan masyarakat umumnya. Dalam hal usahanya koperasi telah menyusun laporan keuangan tetapi dalam penyusunannya masih sederhana. Dalam menyusun laporan keuangannya penyusunan laporan keuangan wajib dilakukan sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban tahunan koperasi yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan laporan keuangan yang disusun oleh KSU Dwi Anugrah telah di laporkan dan diperiksa oleh Dinas Koperasi kota Mojokerto namun belum pernah di audit oleh KAP maupun auditor. Karena penerapan pada penyusunan laporan keuangan di KSU Dwi Anugrah belum sesuai pada standar akuntansi keuangan karena keterbatasan sumber daya manusia di bidang akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Berdasarkan uraian maka peneliti tertarik

untuk membahas masalah tersebut dan menyusunnya dalam bentuk laporan akhir yang berjudul **“Analisis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan KSU Dwi Anugrah Mojokerto”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penyusunan laporan akhir ini, fokus pada penelitian Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Laporan Keuangan KSU Dwi Anugrah Mojokerto. Laporan keuangan yang di pakai sebagai sumber penelitian yaitu laporan keuangan yang di buat oleh KSU Dwi Anugrah Mojokerto pada periode tahun 2017. Karena periode tersebut menunjukkan kondisi yang paling aktual berkaitan dengan yang diteliti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan di KSU Dwi Anugrah Mojokerto ?
2. Apakah penyajian laporan di KSU Dwi Anugrah Mojokerto sudah sesuai berdasarkan SAK ETAP ?
3. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) terhadap laporan keuangan KSU Dwi Anugrah Mojokerto ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan di KSU Dwi Anugrah Mojokerto.
2. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan di KSU Dwi Anugrah Mojokerto apakah sudah sesuai SAK ETAP.
3. Untuk menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) terhadap laporan keuangan KSU Dwi Anugrah Mojokerto.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan untuk menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dengan mengetahui kesesuaian dan penyajian laporan keuangan koperasi yang sesuai dengan SAK ETAP.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat dibuat rujukan dalam pembuatan dan penyajian laporan keuangan koperasi yang sesuai SAK ETAP.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi tambahan dalam pembuatan dan kesesuaian penyajian laporan

keuangan Koperasi Dwi Anugrah Mojokerto yang akan datang sesuai dengan SAK ETAP